

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari besaran angka Produk Domestik Bruto (PDB) yang meningkat, tetapi juga dari bagaimana angka tersebut tercerminkan dalam kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan, dan daya saing negara dalam perekonomian global. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan dan mempercepat laju pertumbuhannya agar sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif, berbagai tantangan struktural masih menghambat optimalisasi pertumbuhan tersebut. Ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran yang masih tinggi, serta ketidakmerataan pembangunan antarwilayah menjadi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap lambatnya pemerataan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi global juga turut mempengaruhi kinerja perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan guna menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Dua faktor utama yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah jumlah penduduk dan belanja negara. Kedua faktor ini dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi apabila dikelola dengan baik. Namun, apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat, jumlah penduduk yang besar serta tingginya belanja negara justru dapat menjadi beban bagi perekonomian nasional.

Permasalahan Jumlah Penduduk di Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam hal tenaga kerja dan pasar domestik. Populasi yang besar dapat menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui produktivitas tenaga kerja dan konsumsi masyarakat. Namun, tingginya jumlah penduduk juga menghadirkan berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi apabila tidak dikelola dengan baik.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah ketimpangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan lapangan kerja. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, khususnya di kalangan usia produktif. Selain itu, dominasi pekerja informal yang tidak memiliki kepastian pendapatan dan perlindungan sosial juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.

Kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Meskipun jumlah penduduk besar, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja masih belum optimal. Rendahnya

kualitas pendidikan serta minimnya pelatihan keterampilan menyebabkan daya saing tenaga kerja Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berakibat pada stagnasi pertumbuhan ekonomi.

Urbanisasi yang tidak terkendali juga menjadi permasalahan yang muncul akibat tingginya jumlah penduduk. Perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan yang tidak diiringi dengan perencanaan yang baik menyebabkan tekanan terhadap infrastruktur perkotaan, meningkatnya permukiman kumuh, serta bertambahnya kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Di sisi lain, distribusi penduduk yang tidak merata turut menjadi faktor yang menghambat pemerataan pembangunan. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara daerah lain masih mengalami keterbatasan dalam hal infrastruktur dan akses terhadap layanan publik. Ketimpangan ini menyebabkan beberapa wilayah mengalami kelebihan kapasitas penduduk, sedangkan daerah lain mengalami kekurangan tenaga kerja yang menghambat optimalisasi pembangunan ekonomi di tingkat regional.

Permasalahan dalam Pengelolaan Belanja Negara di Indonesia sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal, belanja negara memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta subsidi dan bantuan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun belanja negara terus meningkat, efektivitas dalam pengelolaannya masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Salah satu permasalahan utama dalam belanja negara adalah ketidakseimbangan antara belanja dan pendapatan negara, yang menyebabkan defisit anggaran. Ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari pajak dan sumber lainnya, pemerintah harus menutupi kekurangan tersebut melalui utang. Jika tidak dikelola dengan baik, peningkatan utang negara dapat menjadi beban fiskal yang berisiko terhadap stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

Efisiensi penggunaan anggaran juga menjadi perhatian utama. Sebagian besar anggaran masih terserap dalam belanja rutin seperti pembayaran gaji pegawai negeri dan subsidi energi, sementara alokasi untuk investasi produktif dalam pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masih belum maksimal. Hal ini menghambat upaya peningkatan produktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Tingkat penyerapan anggaran yang rendah juga menjadi kendala dalam optimalisasi belanja negara. Perencanaan yang kurang matang serta birokrasi yang kompleks sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Akibatnya, anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan dalam distribusi belanja negara antarwilayah juga menjadi faktor yang menghambat pemerataan pembangunan. Sebagian besar anggaran masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pusat-pusat ekonomi utama, sementara daerah tertinggal masih mengalami keterbatasan dalam akses terhadap infrastruktur dan layanan publik yang memadai. Hal ini menyebabkan kesenjangan

pembangunan yang semakin melebar antara daerah maju dan daerah yang masih berkembang.

Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara juga menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Praktik korupsi dan inefisiensi dalam penggunaan anggaran masih sering terjadi, sehingga mengurangi efektivitas belanja negara dalam mencapai tujuan pembangunan. Kurangnya pengawasan yang ketat terhadap alokasi dan realisasi anggaran menyebabkan banyaknya program yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Urgensi Penelitian, meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam hal jumlah penduduk serta kapasitas belanja negara yang terus meningkat, efektivitas kedua faktor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana jumlah penduduk dan belanja negara dapat dikelola secara optimal guna memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam konteks jumlah penduduk, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas kesempatan kerja agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif.

Dalam konteks belanja negara, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas alokasi anggaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta mengidentifikasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Dengan memahami hubungan antara jumlah penduduk, belanja negara, dan pertumbuhan ekonomi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif guna mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimana mengelola jumlah penduduk yang besar agar dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana memastikan bahwa belanja negara digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung pembangunan jangka panjang. Permasalahan pengelolaan jumlah penduduk dan belanja negara ini menjadi penting untuk dianalisis, mengingat keduanya saling berinteraksi dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tanpa pengelolaan yang tepat, meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan anggaran negara yang cukup, laju pertumbuhan ekonomi tetap akan terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menjadi sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam suatu penelitian yang berjudul **“Pengaruh Jumlah Penduduk dan Belanja Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”**

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Penduduk, Belanja Negara dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dari 5 tahun terakhir

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta)	Belanja Negara (Miliar) Rp	Pertumbuhan Ekonomi
2020	271,0	2595,5	-2,1
2021	273,9	2786,4	3,7
2022	276,8	3096,3	5,3
2023	279,5	3123,7	5
2024	282,2	3304,1	5

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Sumber: Kementerian Keuangan Indonesia

A. Jumlah Penduduk

- 2020: 271,0 Juta Jiwa (Mengalami kenaikan + 2,9 Juta jiwa)
- 2021: 273,9 Juta Jiwa (pertumbuhan penduduk ini tetap terjadi meskipun ada pandemic COVID 19)
- 2022: 276,8 Juta Jiwa (Factor utama penurunan angka kematian pasca gelombang awal pandemic dan kelahiran tetap stabil)
- 2023: 279,9 Juta Jiwa (Masih menunjukkan tren kenaikan alami,ini juga dipengaruhi oleh peningkatan Kesehatan masyarat.)
- 2024: 282,2 J u t a J i w a (.Pertumbuhan lebih stabil tidak terlalu tajam,menunjukkan transisi menuju bonus demografi dimana populasi usia produktif semakin dominan.)

B. Belanja Negara

- 2020: 2595,5 Miliar (Penanganan Pandemi COVID 19.)
- 2021: 2786,4 Miliar (Mengurangi belanja darurat seiring membaiknya situasi pandemic,meskipun tetap tinggi untuk pemulihan)
- 2022: 3096,3 Miliar (Mengembalikan deficit ke jalur yang lebih sehat dan fokus mulai beralih dari darurat pandemic ke program infrakstruktur dan pembangunan berkelanjutan)
- 2023 : 3123,7 Miliar (mengalami kenaikan mendukung persiapan anggaran Pemilu 2024,Melindungi ekonomi dari ancaman resesi global dan melanjutkan pembangunan strategis)
- 2024 :3304,1 Miliar (Menjaga deficit fiscal dibawah 3% terhadap PDB

sesuai aturan normal dan penurunan ini menandakan konsolidasi fiskal mengurangi ketergantungan pada utang dan membangun stabilitas jangka Panjang)

C. Pertumbuhan Ekonomi`

- 2020: -2,1% (Kontraksi akibat pandemi COVID-19). Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tekanan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Ekonomi terkontraksi sekitar -2,1%.
- 2021: 3,7% (Pemulihan bertahap dengan bantuan konsumsi domestik).
- 2022: 5,3% (Didorong oleh tingginya harga komoditas).
- 2023: 5,0% (Pemulihan berlanjut meski ada penurunan harga komoditas dan tantangan global).
- 2024: 5,0% (didukung konsumsi dan belanja pemerintah)

1.2 Gap Penelitian

Hubungan antara Jumlah Penduduk, Belanja Negara, dan Pertumbuhan Ekonomi
 Teori Ekonomi: Dalam teori pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dapat menjadi faktor pendorong, tetapi harus diimbangi dengan belanja negara yang efektif agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. pertumbuhan jumlah penduduk akan selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sumber daya, yang dapat mengakibatkan kelaparan dan kemiskinan (Malthus, 1798)

Kualitas Sumber Daya Manusia. Belanja negara yang diarahkan pada pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang

pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Dani Rodrik (2013) menekankan pentingnya belanja negara untuk mengatasi dampak negatif dari globalisasi dan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan..DampakDemografi Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat tanpa diimbangi dengan peningkatan infrastruktur dan layanan publik dapat menimbulkan masalah, seperti pengangguran dan kemiskinan, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Banerjee & Duflo (2019) pentingnya kebijakan berbasis bukti untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta perlunya perhatian pada konteks lokal dalam merancang program pembangunan. Kurangnya Studi Empiris: Meskipun ada banyak penelitian yang membahas salah satu variabel penelitian yang secara khusus mengaitkan ketiga faktor ini di Indonesia masih terbatas,.Metodologi yang Beragam: Banyak penelitian menggunakan metodologi yang berbeda, seperti analisis regresi, model ekonomi makro, atau studi kasus, sehingga sulit untuk menggeneralisasi temuan

.Faktor-faktor Konteks Lokal: Peneliti seringkali tidak mempertimbangkan konteks lokal, seperti perbedaan regional dalam hal infrastruktur dan akses terhadap layanan publik, yang dapat mempengaruhi hasil.Data yang Terbatas: Ketersediaan data yang akurat dan terkini tentang belanja negara dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi juga menjadi kendala.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Krisis Ekonomi Global dan Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas memperburuk stabilitas ekonomi dalam lima tahun terakhir, yang mengakibatkan **penurunan pendapatan negara** dan kesulitan dalam memenuhi target belanja negara.

2. Peningkatan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio)

Meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, proporsi penduduk usia produktif yang mendominasi terus berubah. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan dalam **menjaga angka ketergantungan** yang semakin tinggi. Pada periode lima tahun terakhir, Indonesia mulai merasakan peningkatan jumlah penduduk usia tidak produktif, seperti anak-anak dan lansia, yang berdampak pada **ketergantungan sosial dan ekonomi**.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Tidak Merata

Meskipun jumlah penduduk Indonesia besar, kualitas SDM yang kurang memadai di sebagian besar wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil dan wilayah timur Indonesia, menghambat kemampuan untuk memanfaatkan potensi demografi yang ada. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, namun ketimpangan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan masih sangat besar.

4. Efisiensi Penggunaan Anggaran yang Rendah

Meskipun belanja negara Indonesia dalam lima tahun terakhir meningkat

secara signifikan, masalah **pengelolaan dan efisiensi anggaran** masih menjadi kendala besar. Terutama dalam alokasi anggaran yang tidak efisien atau tidak tepat sasaran, serta masalah **korupsi** dan **birokrasi** yang memperburuk kualitas pengeluaran publik.

1.4 Batasan dan Rumusan Masalah

1.4.1 Batasan Masalah

Disini peneliti ingin membuat Batasan-batasan masalah agar lebih terfokus dan tidak menyimpang dari pembahasan penelitian, yaitu: Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, seperti data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, serta sumber internasional seperti World Bank atau IMF, tanpa melibatkan data primer dari survei atau wawancara.

1.4.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ?
2. Apakah Belanja Negara berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh belanja negara terhadap

pertumbuhan ekonomi di Indonesia

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang di dapat peneliti dari penelitian ini, dan peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademisi

Memberikan pemahaman lebih mendalam tentang hubungan antara jumlah penduduk, belanja negara, dan pertumbuhan ekonomi dalam konteks Indonesia. Menyediakan contoh penerapan teknik analisis ekonomi yang dapat digunakan dalam penelitian lebih lanjut dan menjadi dasar untuk studi-studi selanjutnya dalam bidang ekonomi pembangunan dan kebijakan fiskal. Dan Kontribusi terhadap Ilmu Ekonomi dengan menyumbangkan pengetahuan baru yang dapat memperkaya literatur akademik di bidang ekonomi makro dan ekonomi pembangunan.

2. Manfaat Pemerintah

Penelitian pemerintah mengenai pengaruh jumlah penduduk dan belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia memiliki manfaat yang luas dan signifikan. Dengan hasil yang komprehensif, penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik, meningkatkan perencanaan anggaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jumlah Penduduk

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013) menjabarkan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sedangkan menurut Said (2012) yang dimaksud dengan penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Reverend Thomas Maltus pada tahun 1798 (Arsyad, 2014) mengemukakan teorinya tentang hubungan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya konsep hasil yang menurun (concept of diminishing return). Maltus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kalilipat setiap 30-40 tahun.

Sementara itu saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di atas tingkat subsisten yaitu pendapatan yang hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk hidup. Menurut

Maier (Kuncoro, 2012): di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia. Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan, yaitu:

- 1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit;
- 2) Banyak negara yang penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian Karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya;
- 3) Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarannya kota-kota di NSB membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga kota. Telaah lain menunjukkan bahwa penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi; satu dari

segi permintaan dan yang lain dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi jika penduduk ini mempunyai kapasitas tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Jadi pertumbuhan penduduk dengan tingkat penghasilan rendah tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi. Di sisi lain, alasan penduduk dipandang logis sebagai penghambat pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan (Dumairy, 2016).

Bagi negara-negara berkembang keadaan perkembangan penduduk yang cepat justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Karena akan selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk, yang akhirnya akan dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Jadi, karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka paling tidak terdapat kesulitan memperoleh kesempatan kerja. Jika mereka tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur, maka justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah.

Penduduk yang selalu berkembang menuntut adanya perkembangan

ekonomi yang terus-menerus. Semua ini memerlukan lebih banyak investasi. Bagi negara berkembang, cepatnya perkembangan penduduk menjadi sebuah ganjalan dalam perkembangan ekonomi, karena negara-negara ini memiliki sedikit kapital. Todaro (2014), menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.

Dengan kata lain, semakin banyak angkatan kerja yang digunakan dalam proses produksi maka output hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas tertentu. Meskipun terdapat pertentangan mengenai konsekuensi positif dan negatif yang ditimbulkan oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk, namun selama beberapa dekade mulai muncul gagasan baru. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Robert Cassen dalam Todaro (2014) sebagai berikut:

- 1) Persoalan kependudukan tidak semata-mata menyangkut jumlah akan tetapi juga meliputi kualitas hidup dan kesejahteraan materiil;
- 2) Pertumbuhan penduduk yang cepat memang mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Laju pertumbuhan penduduk yang terlampau cepat meskipun memang bukan merupakan penyebab utama dari keterbelakangan, harus disadari bahwa hal tersebut merupakan salah satu faktor penting penyebab keterbelakangan di banyak negara;

Pertumbuhan penduduk secara cepat menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi yang merugikan dan hal itu merupakan masalah yang utama harus dihadapi negara-negara Dunia Ketiga. Mereka kemudian mengatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat mendorong timbulnya berbagai macam masalah ekonomi, sosial dan psikologis yang melatarbelakangi kondisi keterbelakangan yang menjerat negaranegara berkembang. Melonjaknya beban pembiayaan atas anggaran pemerintah tersebut jelas akan mengurangi kemungkinan dan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup generasi dan mendorong terjadinya transfer kemiskinan kepada generasi mendatang yang berasal dari keluarga berpenghasilan menengah ke bawah (Todaro, 2014).

Pertumbuhan penduduk juga menghalangi prospek tercapainya kehidupan yang lebih baik karena mengurangi tabungan rumah tangga dan juga negara. Di samping itu, jumlah penduduk yang terlampau besar akan menguras kas pemerintah yang sudah sangat terbatas untuk menyediakan berbagai pelayanan kesehatan, ekonomi dan sosial bagi generasi baru.

2.1.1 Faktor-Faktor Mempengaruhi Jumlah Penduduk

Secara umum, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk di Indonesia

a. Kelahiran (Natalitas)

Faktor kelahiran memang merupakan faktor utama penyebab terjadinya pertumbuhan penduduk, bukan hanya di Indonesia, namun di seluruh wilayah dunia.

b. Kematian (Mortalitas)

Kematian merupakan hilangnya tanda-tanda akan kehidupan manusia secara permanen. Kematian bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari faktor usia, jenis penyakit yang diderita, adanya pandemi, kondisi lingkungan sekitar, bencana alam, tempat domisili yang tidak memiliki sarana prasarana yang bisa menjadi pendukung kehidupan.

Jika angka kematian bertambah, angka kependudukan pun akan berkurang, namun sebaliknya bila angka kematian menurun, secara otomatis akan menambah angka kependudukan, karena adanya jumlah kelahiran yang melonjak secara drastis.

c. Migrasi (Perpindahan)

Pengertian migrasi adalah sebuah peristiwa berpindahnya suatu kelompok dari suatu daerah ke daerah lainnya. Pada beberapa kasus, perpindahan suatu kelompok disebabkan adanya alasan untuk bisa mencari dan mendapatkan sumber cadangan makanan yang baru. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kelangkaan yang juga diakibatkan oleh bertambahnya kepadatan penduduk.

Selain migrasi, ada juga istilah lain tentang dinamika penduduk yang disebut mobilitas. Mobilitas ini memiliki arti yang lebih luas daripada migrasi, yaitu didefinisikan sebagai perpindahan sebuah wilayah secara permanen serta sementara

2.1.2 Dampak Jumlah Penduduk

- a. Ekonomi: Jumlah penduduk dapat mempengaruhi ekonomi suatu daerah, baik dalam hal pasar tenaga kerja, konsumsi, maupun pertumbuhan ekonomi.

- b. Lingkungan: Populasi yang besar dapat memberikan tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan.
- c. Sosial: Kesejahteraan sosial dan kualitas hidup dapat dipengaruhi oleh jumlah dan distribusi penduduk.

2.2 Belanja Negara

Belanja negara adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran serta perincian berbagai kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk waktu satu tahun (Rachmat, 2010:139). Anggaran tersebut merupakan batas tertinggi dari pengeluaran negara untuk melaksanakan tugas dan keperluan negara dan penerimaan negara yang diperkirakan dapat menutup pengeluaran dalam periode tertentu, agar tidak menimbulkan defisit anggaran. Sony berpendapat, bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi biaya dari kinerja pemerintah yang hendak dicapai dalam periode tertentu dimana anggaran tersebut harus dikonfirmasi kepada publik untuk diberi masukan dan kritik.

Mardiasmo (2018): Belanja negara adalah semua pengeluaran pemerintah yang mencakup semua bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Munandar (2016): Belanja negara didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk transfer, subsidi, maupun pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan publik yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.2.1 Jenis Jenis Belanja Negara

a. Belanja pegawai

Belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, seperti gaji, tunjangan, honorarium, vakasi, dan kontribusi sosial, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

b. Belanja barang

Belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja perlengkapan untuk memproduksi barang dan jasa, belanja barang untuk kepentingan masyarakat, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan.

c. Belanja modal

Pembelanjaan untuk memperoleh aset dan/atau menambah nilai aset tetap atau lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Aset yang dimaksud bisa berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

d. Belanja bunga utang

Pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratannya. Pembelanjaan bunga utang meliputi pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan bunga obligasi negara, pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon obligasi negara, pembayaran diskon SBSN, dan denda.

e. Belanja subsidi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Belanja subsidi dibedakan menjadi dua jenis, yakni belanja subsidi energi (BBM, LPG, tenaga listrik) dan belanja subsidi non-energi.

f. Belanja hibah

Belanja pemerintah pusat yang bersifat sukarela dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang atau jasa dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pemerintah negara lain, organisasi internasional yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan terus-menerus serta dilakukan dengan naskah perjanjian antarpemberi hibah dan penerima hibah.

g. Bantuan Sosial

Semua pengeluaran dalam bentuk transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai bencana alam.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk belanja rehabilitasi sosial, belanja pemberdayaan sosial, belanja perlindungan sosial, belanja penanggulangan bencana, belanja jaminan sosial, dan belanja penanggulangan kemiskinan.

h. Belanja lain-lain

Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

i. Transfer ke daerah

Semua pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Transfer ke daerah meliputi transfer dana bagi hasil, transfer dana alokasi khusus, transfer dana alokasi umum, transfer dana penyesuaian, dan transfer otonomi khusus.

2.2.2 Tujuan Belanja Negara

- a. Pembangunan Ekonomi: Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dalam infrastruktur dan sektor produktif.
- b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Membiayai program-program sosial dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- c. Pemerataan Pembangunan: Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antara daerah yang kaya dan daerah yang kurang berkembang.
- d. Stabilisasi Ekonomi: Menggunakan belanja negara sebagai alat untuk mengatasi inflasi, pengangguran, dan resesi ekonomi.

2.2.3 Sumber Dana Pendanaan Belanja Negara

- a. Pajak: Pendapatan dari pajak adalah sumber utama pendanaan belanja negara, baik pajak langsung (seperti PPh) maupun pajak tidak langsung (seperti PPN).
- b. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP): Termasuk pendapatan dari sumber daya alam, denda, dan fee layanan pemerintah.
- c. Pinjaman: Pemerintah dapat meminjam dari lembaga keuangan domestik atau internasional untuk membiayai belanja negara, terutama untuk proyek infrastruktur besar.

d. Hibah: Bantuan dari negara lain atau organisasi internasional yang tidak perlu dikembalikan.

2.2.4 Dampak Belanja Negara

- a. Positif: Dapat meningkatkan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pelayanan publik.
- b. Negatif: Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan defisit anggaran, utang yang tinggi, atau inflasi.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi telah dikembangkan oleh berbagai ekonom sepanjang sejarah untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berikut adalah beberapa landasan teori utama tentang pertumbuhan ekonomi:

2.3.1 Teori Klasik

- Teori klasik tentang pertumbuhan ekonomi berasal dari para pemikir seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus. Dalam pandangan ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan produktivitas.
- Adam Smith (1776) dalam karyanya *The Wealth of Nations* menekankan pentingnya pembagian kerja (*division of labor*) dan pasar bebas. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang didorong oleh spesialisasi.

- David Ricardo (1817) mengembangkan teori keunggulan komparatif, yang menjelaskan bagaimana perdagangan internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ricardo juga menekankan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat oleh hukum hasil tambah yang menurun (law of diminishing returns), terutama pada faktor tanah yang terbatas.
- Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat akan menekan pertumbuhan ekonomi karena sumber daya yang terbatas, terutama makanan, akan habis. Malthus memperingatkan tentang jebakan Malthusian, di mana peningkatan populasi akan mengurangi pendapatan per kapita.

2.3.2 Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan neoklasik dipelopori oleh Robert Solow dan Trevor Swan pada 1950-an. Teori ini merupakan model utama dalam ekonomi pertumbuhan modern, yang menekankan pada akumulasi modal, tenaga kerja, dan teknologi.

- a. Model Solow-Swan atau dikenal sebagai Solow Growth Model berfokus pada peran akumulasi modal fisik dan pertumbuhan populasi sebagai faktor utama dalam menentukan output per kapita. Namun, Solow menyatakan bahwa akumulasi modal saja tidak cukup untuk menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan karena hukum hasil marjinal yang menurun.
- b. Modal (Capital, K): Akumulasi modal fisik seperti mesin, bangunan, dan infrastruktur dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak modal yang diinvestasikan, semakin tinggi output yang dihasilkan, meskipun dengan tingkat hasil yang menurun.
- c. Tenaga Kerja (Labor, L): Ketersediaan tenaga kerja yang memadai adalah

faktor penting dalam produksi. Tenaga kerja yang lebih banyak dapat meningkatkan output, tetapi seiring dengan peningkatan tenaga kerja, produktivitas tambahan dari tenaga kerja tersebut akan berkurang.

- d. Kemajuan Teknologi (Technology, A): Teknologi dalam model ini merupakan sumber pertumbuhan jangka panjang yang utama. Kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi produksi, memungkinkan tenaga kerja dan modal menghasilkan output yang lebih tinggi tanpa perlu peningkatan jumlah modal atau tenaga kerja. Oleh karena itu, pertumbuhan jangka panjang dalam teori neoklasik terutama ditentukan oleh kemajuan teknologi yang dianggap eksogen (datang dari luar model).

Persamaan dasar dalam model ini adalah:

$$Y = A \cdot F(K, L)$$

Di mana:

- Y = output (PDB)
- A = tingkat teknologi
- K = modal (capital)
- L = tenaga kerja (labor)

- e. Faktor Teknologi: Teknologi dalam model ini dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan modal.

2.3.3 Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen dikembangkan pada 1980-an sebagai tanggapan atas kelemahan dalam model pertumbuhan neoklasik yang menganggap teknologi sebagai faktor eksogen. Teori ini dipelopori oleh Paul Romer, Robert Lucas, dan Robert Barro.

- a. Dalam teori pertumbuhan endogen, kemajuan teknologi, inovasi, dan peningkatan modal manusia dianggap sebagai hasil dari aktivitas ekonomi itu sendiri, bukan sebagai faktor luar. Penelitian dan pengembangan (R&D), investasi dalam pendidikan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan jangka panjang.
- b. Paul Romer menekankan peran pengetahuan dan inovasi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Menurut Romer, pengetahuan adalah barang yang tidak menurun (non-rival), artinya satu orang yang menggunakan pengetahuan tidak mengurangi ketersediaan pengetahuan bagi orang lain. Ini memungkinkan adanya increasing returns to scale (peningkatan hasil dari skala) dalam ekonomi.
- c. Robert Lucas menyoroti pentingnya modal manusia (human capital), seperti pendidikan dan keterampilan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia berpendapat bahwa akumulasi modal manusia tidak hanya meningkatkan produktivitas individu, tetapi juga menciptakan efek eksternalitas positif bagi masyarakat secara keseluruhan.
- d. Teori ini juga menjelaskan bagaimana peran kebijakan pemerintah dalam mendukung R&D, pendidikan, dan inovasi dapat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

2.3.4 Teori Pertumbuhan Keynesian

John Maynard Keynes berfokus pada bagaimana permintaan agregat dalam jangka pendek mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif ini, pertumbuhan ekonomi dapat terhambat oleh kurangnya permintaan barang

dan jasa. Oleh karena itu, Keynes menyarankan bahwa intervensi pemerintah diperlukan, terutama dalam kondisi resesi, untuk meningkatkan permintaan agregat melalui kebijakan fiskal (belanja pemerintah dan pemotongan pajak). Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Keynesian berpendapat bahwa permintaan barang dan jasa merupakan pendorong utama investasi dan oleh karena itu mendorong pertumbuhan. Kebijakan ekspansif dari pemerintah dapat meningkatkan lapangan kerja dan output jangka pendek, dan dalam beberapa kasus, bisa juga berdampak pada peningkatan kapasitas produksi jangka panjang.

2.3.5 Teori Pertumbuhan Schumpeterian

Teori ini berasal dari pandangan Joseph Schumpeter yang menekankan peran inovasi dan kewirausahaan dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam bukunya *The Theory of Economic Development* (1911), Schumpeter menjelaskan bagaimana inovasi yang dilakukan oleh wirausahawan dapat mengubah struktur pasar dan menciptakan "gale of creative destruction."

- a. Creative destruction adalah proses di mana teknologi dan inovasi baru menggantikan yang lama, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Schumpeter berargumen bahwa inovasi, yang didorong oleh kompetisi dan kewirausahaan, adalah sumber utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- b. Schumpeter juga menekankan peran monopoli sementara yang memungkinkan wirausahawan mendapatkan keuntungan dari inovasi mereka, yang kemudian akan mendorong lebih banyak inovasi di masa depan.

2.3.6 Teori Pertumbuhan Struktural

Teori ini berfokus pada perubahan struktural dalam ekonomi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. W. Arthur Lewis dan Simon Kuznets adalah tokoh utama dari teori ini. Mereka menekankan pentingnya transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang.

- a. Model Dua Sektor Lewis menggambarkan bagaimana tenaga kerja berlebih di sektor pertanian dapat dipindahkan ke sektor industri, dimana produktivitas lebih tinggi, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Simon Kuznets juga menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan ekonomi, terjadi perubahan struktur ekonomi dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa).

2.3.7 Teori Pertumbuhan Ekonomi Baru (New Growth Theory)

Teori ini merupakan perluasan dari teori pertumbuhan endogen dan menekankan pada pentingnya modal manusia, pengetahuan, dan inovasi sebagai faktor endogen dalam perekonomian. Berbeda dengan teori neoklasik yang menganggap pertumbuhan teknologi sebagai eksogen, New Growth Theory menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan, penelitian, dan inovasi dapat secara langsung mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti /Tahun	Indikator Variabel	Hasil Penelitian
1.	Dyan Puspita Sari, dkk (2021)	X1:Jumlah Penduduk Y:Pertumbuhan Ekonomi	Variabel Jumlah Penduduk, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi
2.	Alifah Yustina Salsabila, dkk (2021)	X1: Jumlah Penduduk Y: Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Gerbang Kertosusila
3.	Budi Darma, (2021)	X1 : Jumlah Penduduk Y: Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Penduduk berpengaruh secara persialdan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tebo 2016- 2020
4.	Abdul Rajab, Rizki Novianti,	X1: Jumlah Penduduk Y: Pertumbuhan ekonomi	variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
5.	Sanjaya, A., & Suryanto, S. (2019)	X1:Belanja Negara Y: :Pertumbuhan Ekonomi	Penelitian ini mengkaji hubungan antara belanja negara dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak

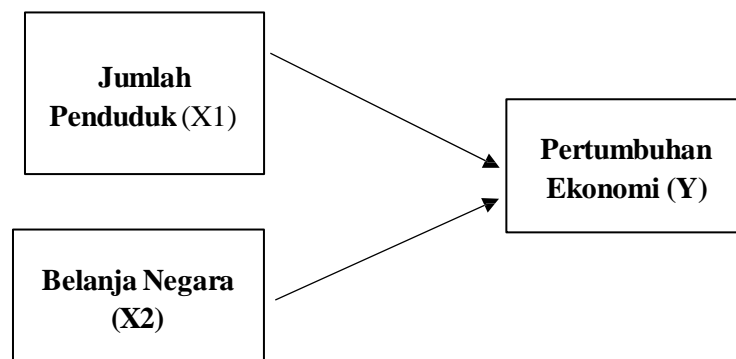
			menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
6.	Alamsyah, R., & Hidayat, H. (2020)	X1: Belanja Negara Y: Pertumbuhan Ekonomi	Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia menggunakan data time series periode 1990 hingga 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja Negara dalam infrastruktur terutama transportasi dan energi) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
7.	Yuliawati, M., & Irfan, I. (2022)	X1: Belanja Negara Y: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Penelitian ini menemukan bahwa belanja Negara berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia..
8.	Asep Saepudin, Siti Nur Azizah (2018)	X1: Jumlah Penduduk Y: Pertumbuhan Ekonomi	Penelitian ini mengungkapkan jumlah penduduk memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat diperlukan

			untuk memastikan bahwa pertumbuhan jumlah Penduduk dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian.
9.	Rina Lestari & AgusSetiawan (2021)	X1:Jumlah Penduduk X2: Belanja Negara Y: Pertumbuhan Ekonomi	Penelitian ini menemukan bahwa jumlah penduduk Indonesia memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pengaruh jumlah penduduk sangat tergantung pada kualitas SDM yang ada. Selain itu, belanja negara yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan Pendidikan terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka Panjang.
10.	Fatimah Z.& Junaidi, F 2019	X1: Jumlah Penduduk X2: Belanja Negara Y: Pertumbuhan Ekonomi	Penelitian ini menemukan bahwa jumlah penduduk dan belanja negara bersignifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi

2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan suatu hubungan yang berkaitan antara variabel satu dengan variabel yang lain dalam penelitian (Sugiyono, 2019). Kerangka Konseptual menggambarkan hubungan dari variabel indenpenden, dalam hal ini adalah Jumlah Penduduk (X_1), Belanja Negara (X_2), terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

2.6 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016), hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya.

1. H1:Jumlah Penduduk memiliki pengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. H2:Belanja Negara memiliki pengaruh positif dan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.